



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 1339-1348

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Determinasi PDB, Pendidikan, dan Kemiskinan terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia

Rona Hinirim Gultom, Noubel Putra Nainggolan, Febryanti Angkat, Nurlia Aprianti Sinurat, Muhammad Bukhori Dalimunthe, Nasrullah Hidayat

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

[ronagultom.7223240011@mhs.unimed.ac.id](mailto:ronagultom.7223240011@mhs.unimed.ac.id), [noubelnainggolan@gmail.com](mailto:noubelnainggolan@gmail.com), [febryanti.angkat13@gmail.com](mailto:febryanti.angkat13@gmail.com),  
[nurliasinurat@gmail.com](mailto:nurliasinurat@gmail.com), [daliori86@unimed.ac.id](mailto:daliori86@unimed.ac.id), [nasrullah@unimed.ac.id](mailto:nasrullah@unimed.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan persentase penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia selama periode 2012–2024. IPM digunakan sebagai indikator komprehensif untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dianalisis dengan metode regresi linier berganda menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) untuk melihat hubungan serta signifikansi pengaruh antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia. Secara parsial, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, menegaskan bahwa peningkatan alokasi anggaran pendidikan mampu mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia. Sebaliknya, persentase penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, menunjukkan bahwa tingginya tingkat kemiskinan menjadi penghambat utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya merata atau tidak langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Temuan ini menekankan pentingnya perbaikan efektivitas kebijakan pengeluaran publik, khususnya dalam sektor pendidikan dan program pengentasan kemiskinan, agar pembangunan manusia di Indonesia dapat berkembang secara lebih inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah.*

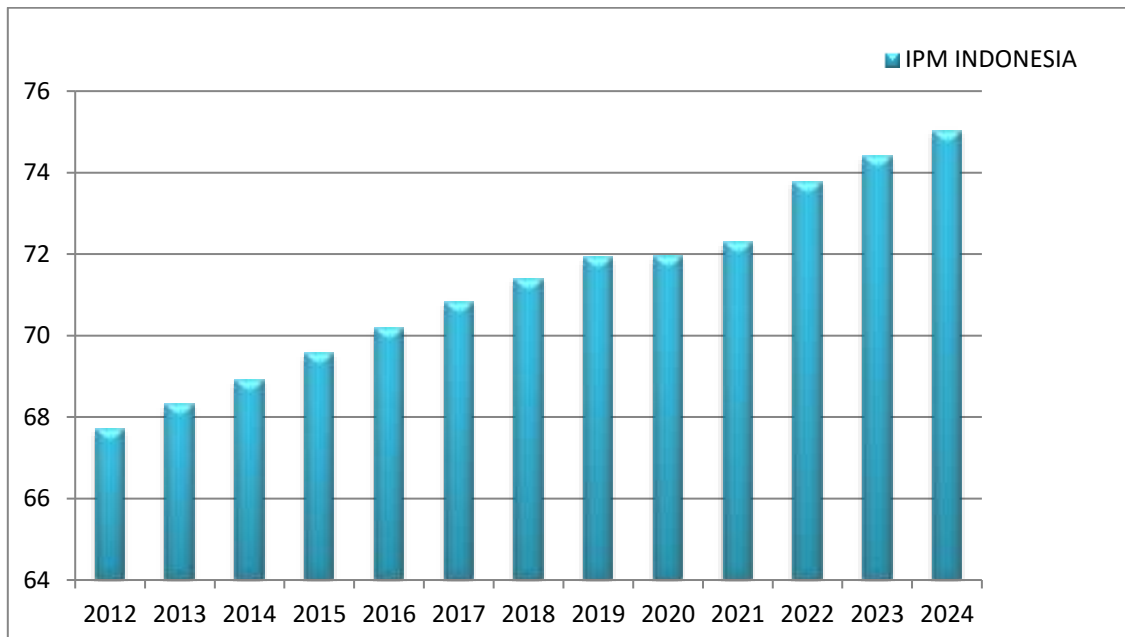
*Kata kunci: PDB, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*

### 1. Latar Belakang

Paradigma pembangunan yang berkembang saat ini menempatkan manusia dan kesejahteraannya sebagai fokus utama, menggantikan dominasi pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator tunggal terkait kesuksesan pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi alat ukur komprehensif yang merefleksikan kualitas hidup manusia melalui tiga dimensi pokok: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Menurut (Sagar and Najam 1998), IPM menyediakan alternatif terhadap PDB dalam mengukur keberhasilan pembangunan, dengan menilai kesejahteraan manusia berdasarkan umur panjang, akses terhadap pendidikan, dan kemampuan ekonomi. Upaya meningkatkan indikator-indikator ini ditujukan guna memperbaiki kualitas hidup, mengatasi disparitas geografis, dan memperhatikan heterogenitas individu di masyarakat. Keberhasilan pembangunan manusia, bagaimanapun, tetap bergantung pada kinerja pemerintah dalam menciptakan regulasi yang mendukung ketertiban sosial dan pembangunan yang inklusif (Dewi, Yusuf, and Iyan 2017). Di sisi lain, tantangan dalam meningkatkan IPM masih signifikan, utamanya pada negara-negara berkembang misalnya Indonesia. Tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan alokasi anggaran yang belum optimal menjadi hambatan utama dalam mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan. Itulah mengapa, pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi IPM termasuk aspek krusial untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang optimal.

Salah satu negara yang masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan manusia adalah Indonesia. Indonesia termasuk negara kepulauan yang ada di kawasan Asia Tenggara serta merupakan negara yang

berpopulasi terbesar keempat secara global setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Mengacu laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada 2022 menyentuh angka 275,77 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 151 jiwa/km<sup>2</sup> (BPS, 2023). Indonesia terdiri atas 38 provinsi dengan tingkat pembangunan manusia yang bervariasi antarwilayah, mencerminkan masih adanya kesenjangan pembangunan antar daerah. Mengacu laporan United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2023, nilai Human Development Index (HDI) Indonesia tercatat sebesar 0,713, menempatkannya pada peringkat ke-114 dari 191 negara di dunia (UNDP, 2023). Angka ini tergolong lebih rendah dibanding sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia (0,803), Thailand (0,800), dan Filipina (0,718), namun sedikit lebih tinggi dibandingkan Vietnam (0,703) dan Laos (0,607). Temuan tersebut mengindikasikan, meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan dalam pembangunan manusia, masih terdapat tantangan besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat agar dapat sejajar dengan negara-negara lain di kawasan.



**Grafik 1. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012-2024**  
Sumber : Badan Pusat Statistik

Di Indonesia, tantangan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Mengacu laporan BPS, meskipun terdapat tren peningkatan IPM dari tahun 2012 hingga 2024, capaian IPM Indonesia masih tergolong dalam kategori tinggi bawah dan belum sejajar dengan rata-rata kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2012, IPM Indonesia tercatat sebesar 67,70, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 72,90. Hingga tahun 2024, IPM Indonesia meningkat menjadi 75,02, menunjukkan adanya kemajuan yang berkelanjutan dalam kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat (BPS, 2024). Meskipun demikian, nilai IPM Indonesia tergolong menempati posisi rendah di antara sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand, yang masing-masing memiliki nilai HDI di atas 0,80 pada tahun 2023 (UNDP, 2023).

Temuan tersebut mengindikasikan, meskipun terdapat peningkatan pembangunan manusia secara nasional, masih terdapat tantangan besar dalam pemerataan kualitas sumber daya manusia antarwilayah. Beberapa provinsi, terutama di bagian timur Indonesia, masih mencatat nilai IPM di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menandakan perlunya intervensi kebijakan yang lebih efektif dalam memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, serta peningkatan daya beli masyarakat. Penelitian oleh Rahman dan Putri (2023) mengindikasikan, peningkatan belanja pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap peningkatan IPM, yang mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan publik dalam mendukung pembangunan manusia yang berkeadilan.

IPM termasuk indikator krusial bagi pengukuran kesuksesan pembangunan sebuah wilayah khususnya dari sisi peningkatan kualitas hidup manusia. (Angkat and Saharuddin 2024) pada studinya menjelaskan bahwa, IPM ialah indeks yang dipergunakan dalam pengukuran capaian pembangunan sebuah wilayah melalui tiga dimensi, di antaranya harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. Nilai IPM menerangkan sejauh mana tercapainya tujuan

tertentu pada sebuah wilayah, di antaranya angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar seluruh penduduk dan tingkat pengeluaran serta konsumsi untuk memenuhi kriteria hidup layak. Jika mendekati nilai 100 IPM suatu daerah atau negara, maka makin dekat dengan jalan untuk mencapai tujuan tersebut begitu pula sebaliknya makin dekat angka 0, disimpulkan bahwa pembangunan manusia dalam negara itu makin buruk (Yuyun Nuriyah Muslih 2017).

(Sari 2018) menjelaskan, Konsep Pembangunan Manusia yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengkategorikan kinerja pengembangan manusia dalam rentang 0,0 – 100,0 melalui kategori kategori berupa:

- Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- Menengah Atas : IPM antara 66,0 –79,9
- Menengah Bawah : IPM antara 50,0 –65,9
- Rendah : IPM kurang dari 50,0

Dengan memotong tiga dimensi utama, di antaranya kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak menjadikan IPM alat ukur multidimensional menjadi acuan bagi pemerintah merancang dan mengevaluasi kebijakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu faktor kunci dalam memengaruhi IPM adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merujuk kepada jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan sebuah negara dalam waktu tertentu. Itu merupakan gambaran kondisi ekonomi dan daerah daya saing daerah. Menurut (Parahita 2018) PDB merupakan indikator penting dalam menyelidiki seberapa jauh sebuah negara mampu memproduksi barang dan jasa yang mendukung perekonomiannya. PDB dihitung dengan tiga pendekatan: produksi, pengeluaran, dan pendapatan, yang masing-masing memberikan gambaran tentang kontribusi sektor ekonomi, penggunaan barang dan jasa, serta aliran pendapatan dari kegiatan ekonomi. Peningkatan PDB umumnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yang dapat memengaruhi peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya lewat perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Sebagai contoh, penelitian oleh (Kiray dkk 2023) mengindikasikan, pertumbuhan PDRB yang positif di Provinsi Jawa Tengah berhubungan langsung dengan peningkatan IPM di daerah tersebut.

Secara teori, tingginya PDB seharusnya berdampak positif pada IPM karena memungkinkan pemerintah membiayai sektor-sektor strategis seperti kesehatan dan pendidikan (Todaro & Smith 2006). Namun, studi empiris menunjukkan hasil yang beragam. (Ismawati, & Nurcahyani 2021) menemukan bahwa di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Banten, PDRB tidak selalu berkorelasi signifikan dengan IPM. Temuan tersebut mengindikasikan, pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan distribusi yang merata supaya nilai gunanya bisa dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat.

Faktor lainnya yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia adalah pengeluaran pemerintah. Wagner mengembangkan teori tentang persentase peningkatan pengeluaran GNP berdasarkan pemantauan di Eropa, Amerika Serikat serta Jepang abad ke-19. Pada perekonomian di mana pendapatan per kapita naik, pengeluaran pemerintah juga naik. Terutama sebab pemerintah wajib menata semua hubungan dalam masyarakat, hukum, pendidikan, budaya, dll. Pandangan Wagner didasarkan oleh teori Organic Theory of State, teori ini mengasumsikan bahwa negara adalah orang yang bebas bertindak secara independent dari orang lain. Kedudukan pemerintah relative meningkat, berdasarkan lima faktor yang menentukan naik turunnya pengeluaran pemerintah: peningkatan perlindungan dan pertahanan, tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi, perluasan dan pertumbuhan wilayah perkotaan, ekonomi, pembangunan manusia dan ketimpangan lapangan kerja sangat penting untuk pembangunan bangsa (Mangkoesobroto, 2001). Pengeluaran di sektor pendidikan, termasuk investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Pengeluaran ini diharapkan mampu meningkatkan akses dan mutu pendidikan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kenaikan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dua komponen utama dalam penghitungan IPM.

(Subri 2003) Meningkatkan kualitas manusia bisa dicapai melalui beragam kebijakan, yakni pengembangan pendidikan yang akan mempertimbangkan arah perkembangan ekonomi di masa depan, pengembangan kesehatan yang akan diperhatikan lebih serius melalui penanaman gaya hidup sehat hingga meluaskan cakupan dan kualitas layanan kesehatan, bagi masyarakat miskin, kenaikan kualitas dipraktikkan melalui pemberian keterampilan praktis, pembinaan perilaku produktif serta memotivasi kehendak mandiri agar secara kolektif bisa terlepas dari

keadaan miskin, mengurangi laju peningkatan pelaksanaan gerakan KB dalam pertumbuhan penduduk, serta memperbaiki keseimbangan kepadatan dan distribusi penduduk.

Penelitian oleh (Sofilda dkk 2023) dan (Abdul Kadir dkk 2017) memberikan pandangan yang berbeda mengenai pengaruh pengeluaran pendidikan pada IPM. Sofilda menghasilkan temuan, pengeluaran sektor pendidikan tidak signifikan pada pendapatan per kapita di Indonesia, sementara Kadir menghasilkan temuan, pengeluaran pendidikan dan kesehatan secara simultan memengaruhi signifikan pada IPM di Maluku. Variasi hasil ini mengindikasikan bahwa konteks lokal sangat memengaruhi efektivitas alokasi anggaran pemerintah.

Persentase penduduk miskin juga memainkan peran penting dalam menentukan IPM. Tingginya angka kemiskinan menjadi penghambat publik dalam mengakses layanan mendasar, misalnya pendidikan dan kesehatan, yang berdampak langsung pada rendahnya kualitas hidup. Kemiskinan di suatu daerah akan menghalangi individu agar mendapat sumber daya manusia yang bermutu seperti pendidikan, gizi yang buruk, rendahnya kualitas populasi, dan sebagainya. Teori Lingkaran Kemiskinan oleh (Todaro & Smith 2006) menjelaskan bahwa kemiskinan menciptakan siklus keterbelakangan yang sulit diputus. Penelitian oleh Nasution et al. (2021) di Kota Medan mengindikasikan, tingkat kemiskinan memengaruhi negatif signifikan pada IPM. Studi dari Si Nyoman & Ni Putu (2021) juga mengindikasikan, angka kemiskinan memengaruhi negatif pada IPM, di mana kemiskinan disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar serta kurang memperhatikan kebutuhan lainnya misalnya pendidikan dan layanan kesehatan. Kemiskinan dapat muncul akibat kelangkaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan kurangnya akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan.

Meskipun telah dilakukan banyak kajian guna memahami hubungan antara PDB, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan persentase penduduk miskin pada IPM, hasilnya masih beragam dan sering kali bersifat kontekstual. Riset ini ditujukan guna mengisi celah penelitian tersebut melalui penganalisisan pengaruh ketiga variabel terhadap IPM di Indonesia pada periode 2012-2024. Temuan penelitian harapannya bisa menyajikan masukan kebijakan yang lebih efektif dan terarah untuk meningkatkan IPM di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Data yang dimanfaatkan pada studi ini berupa data kuantitatif numerik, yang mana variabel independennya terdiri dari tiga jenis, yaitu produk domestik regional bruto, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan persentase penduduk miskin, sedangkan variabel dependennya adalah IPM. Data sekunder yang dipergunakan pada studi ini berasal dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan mencakup periode 13 tahun (2012–2024). Metode analisis data yang dipergunakan ialah berupa regresi linier berganda mempergunakan aplikasi EViews. Model regresi dengan beberapa variabel independen disajikan di sini. Analisis regresi linier berganda diterapkan guna menyelidiki arah, signifikansi, dan besarnya pengaruh variabel independen pada dependen.

Estimasi model mempergunakan Ordinary Least Square (OLS) dan evaluasi regresi meliputi uji R-squared, uji F, dan uji t guna mengukur kebaikan model dan pengaruh variabel independen terhadap IPM. Model regresi yang dipergunakan adalah:

$$IPMit = \beta_0 + \beta_1 PDB\_Kit + \beta_2 PENDIDIKANit + \beta_3 MISKINit + \epsilon it,$$

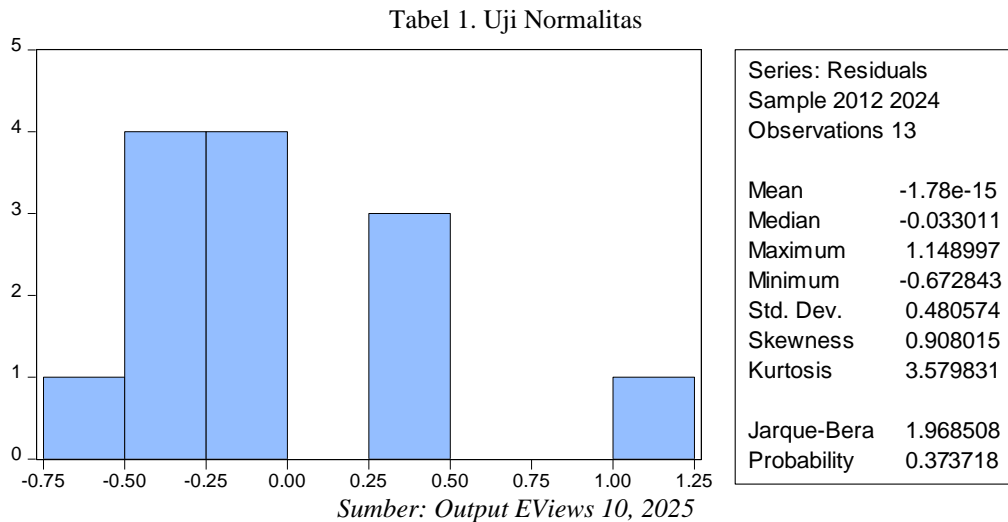
Keterangan :

IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
PDB	= produk domestik bruto atas harga konstan (Milyar Rupiah)
PENDIDIKAN	= Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (Juta Rupiah)
MISKIN	= Tingkat Kemiskinan (%)
$\beta_0$	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_3$	= Koefisien Regresi
$\epsilon it$	= Variabel gangguan

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum memulai proses analisis data melalui regresi linear berganda, langkah awal yang wajib dilakukan adalah pemeriksaan asumsi klasik. Tahapan ini ditujukan guna menjamin, model regresi yang diterapkan mencapai tingkat presisi, estimasi yang tepat, serta output yang bebas dari bias dan stabil. Berdasarkan (Ghozali 2018), agar dapat menilai akurasi model tersebut, diperlukan serangkaian pemeriksaan asumsi klasik, termasuk tes normalitas, tes multikolinieritas, tes heteroskedastisitas, dan tes autokorelasi.



Dari hasil pengujian normalitas yang dilakukan, nilai probabilitas Jarque-Bera yang didapat adalah 1,968508, angka ini ternyata melebihi batas signifikansi  $\alpha$  senilai 5% atau 0,05. Itulah mengapa, bisa diambil simpulan, data yang dipergunakan dalam studi ini mengikuti distribusi normal.

Tabel 2 Perolehan pengujian Multikolinieritas

Variance Inflation Factors			
Date: 11/10/25 Time: 12:59			
Sample: 2012 2024			
Included observations: 13			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	16.90595	713.7136	NA
PDB	0.006962	4.361040	1.065540
PENDIDIKAN	6.58E-11	73.19065	3.233695
MISKIN	0.086652	391.5437	3.334871

Sumber: Output EViews 10, 2025

Mengacu perolehan pengujian multikolinieritas, diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi antarvariabel bebas maupun nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari tiap-tiap variabelnya kurang dari 10. Yang berarti tidak memperlihatkan tanda multikolinieritas antarvariabel independennya pada model regresi. Hasil ini mengindikasikan, hubungan antarvariabel bebas tidak saling memengaruhi secara kuat, sehingga model regresi yang dipergunakan dapat dinilai memenuhi kestabilan dan kelayakan dianalisis pada tahapan berikutnya.

Tabel 3 Perolehan pengujian Heteroskedasticity

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	0.720574	Prob. F(3,9)	0.5645
Obs*R-squared	2.517748	Prob. Chi-Square(3)	0.4721
Scaled explained SS	1.556581	Prob. Chi-Square(3)	0.6693

Sumber: Output EViews 10, 2025

Dari hasil pemeriksaan uji heteroscedasticity, tabel yang disajikan mengindikasikan, skor Probabilitas Chi-Square kurang dari 0,05. Diartikan, varians residual menunjukkan keseragaman di seluruh titik observasi pada model regresi. Artinya, bisa diambil simpulan model regresi terbebas dari tanda heteroskedastisitas, sehingga perolehan estimasi yang diperoleh dapat dianggap konsisten dan reliabel.

Tabel 4. Perolehan pengujian Autokolerasi

Mean dependent var	71.24385
S.D. dependent var	2.299379
Akaike info criterion	1.907670
Schwarz criterion	2.081501
Hannan-Quinn criter.	1.871940
Durbin-Watson stat	1.590581

Sumber: Output EViews 10, 2025

Perolehan pengujian autokorelasi mengindikasikan, nilai Prob. Chi-Square melebihi 0,05, yang berarti tidak terdapat hubungan atau korelasi antarresidual dalam model regresi. Artinya, bisa diambil simpulan data penelitian ini terbebas dari tanda autokorelasi, yang diartikan model regresi yang dipergunakan memenuhi asumsi klasik dan hasil estimasinya dapat dianggap valid.

### 3.2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Statistik pengujian pada studi dilakukan dengan lewat tiga tahapan, di antaranya pengujian parsial (uji t-statistik), uji f-statistik, serta pengujian koefisien determinasi.

Tabel 5. Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	82.53772	4.111685	20.07394	0.0000
PDB	-0.007624	0.083440	-0.091366	0.9292
PENDIDIKAN	2.47E-05	8.11E-06	3.049746	0.0138
MISKIN	-1.474947	0.294367	-5.010581	0.0007

Sumber: Data Diolah, 2025

Pada pengujian parsial ataupun yang dikenal sebagai uji t, proses pengambilan keputusan melibatkan perbandingan antara nilai t yang dihitung dan t dari tabel referensi. Nilai t tabel tersebut diambil dari distribusi t melalui taraf signifikan senilai 0,05 serta derajat kebebasan (df) yang dihitung sebagai n dikurangi k dikurangi 1, pada konteks ini, n merepresentasikan total sampel dan k menunjukkan jumlah variabel independen. Pada studi ini, dengan  $df = 13 - 3 - 1$ , diperoleh t-tabel senilai 1.833. Hipotesis yang dipergunakan adalah:

$H_0$  = secara parsial menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

$H_a$  = menunjukkan secara parsial variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen

Variabel produk domestik bruto menghasilkan skor t-statistik senilai 0.091366, perolehan uji-t mengindikasikan, t-statistik < t-tabel berupa  $0.091366 < 1.833$ , melalui probabilitasnya senilai  $0,9292 > 0,05$  bisa diambil simpulan  $H_0$

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3662>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

diterima, artinya secara parsial variabel produk domestik bruto tidak signifikan memengaruhi terhadap variabel IPM di Indonesia.

Variabel yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan menunjukkan skor t-statistik senilai 3.049746. Analisis uji-t mengungkapkan, nilai tersebut lebih besar daripada t-tabel, yakni  $3.049746 > 1.833$ , dengan tingkat probabilitas 0.0138 yang berada di bawah 0,05. Artinya, bisa diambil simpulan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang menyiratkan bahwa secara parsial, variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memengaruhi positif dan bermakna pada indikator IPM di Indonesia. Kemudian, variabel yang mencerminkan persentase penduduk miskin menghasilkan nilai t-statistik senilai 5.010581. Perolehan uji-t mengindikasikan, nilai ini melebihi t-tabel, yaitu  $5.010581 > 1.833$ , melalui probabilitasnya senilai 0,0007 yang kurang dari 0,05. Akibatnya, bisa diambil simpulan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang menandakan secara parsial, variabel persentase penduduk miskin memengaruhi negatif dan signifikan pada variabel IPM di Indonesia.

Tabel 5. Uji Simultan (Uji F)

F-statistic	65.67869	Durbin-Watson stat	1.590581
Prob(F-statistic)	0.000002		

Sumber: Data Diolah, 2025

Pada pengujian simultan (uji F), pengambilan keputusan dilangsungkan melalui cara membandingkan nilai F-statistik dengan F-tabel. Nilai F-tabel dihasilkan melalui tabel distribusi F dengan ketentuan taraf signifikan senilai 0,05 serta derajat kebebasan ( $df_1 = k$ , serta  $df_2 = n - k - 1$ , pada konteks ini, n ialah jumlah sampel, dan k ialah jumlah variabel bebas. Pada studi ini digunakan 13 sampel (tahun 2012–2024) dan 3 variabel bebas, sehingga diperoleh ( $df_1 = 3$  dan  $df_2 = 13 - 3 - 1 = 9$ ). Mengacu tabel distribusi F, bisa diidentifikasi skor F-tabel senilai 3,86 pada tingkat signifikansi 5%. Adapun hipotesis yang dipergunakan pada studi yaitu :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 =$  Secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 =$  Secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dari perolehan pengujian simultan atau uji F yang dilakukan, nilai F-statistic adalah  $65.67869 > f$ -tabel 3.86 dengan probabilitas senilai  $0.000002 < 0.05$ . Temuan tersebut mengindikasikan, variabel produk domestik regional bruto, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan persentase penduduk miskin secara simultan ataupun bersamaan memengaruhi signifikan terhadap IPM.

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

R-squared	0.956318
Adjusted R-squared	0.941758

Sumber: Data Diolah, 2025

Angka R-squared yang mencapai 0.956318 mengindikasikan, hampir 95% dari perubahan dalam IPM bisa diakibatkan oleh faktor-faktor seperti produk domestik regional bruto, belanja pemerintah di bidang pendidikan, serta proporsi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Adapun 5% sisanya kemungkinan besar berasal dari variabel ataupun elemen lainnya yang bukan termasuk dalam kerangka studi ini.

### 3.3 Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2012-2024

Penelitian ini mengindikasikan, Produk Domestik Bruto (PDB) tidak memengaruhi signifikan terhadap IPM di Indonesia. Mengacu perolehan pengujian parsial (uji t), dihasilkan skor t-statistik senilai 0,091366 yang kluang dari skor t-tabel senilai 1,833, serta nilai probabilitas senilai  $0,9292 > 0,05$ , artinya bisa diambil simpulan  $H_0$  diterima. Diartikan, secara parsial variabel PDB tidak memengaruhi signifikan terhadap IPM. Temuan yang dihasilkan tidak relevan dengan teori yang dikemukakan oleh (Todaro & Smith 2006) yang menghasilkan temuan, peningkatan PDB seharusnya berdampak positif terhadap IPM karena mencerminkan peningkatan kapasitas ekonomi suatu wilayah dalam membiayai sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak signifikannya pengaruh PDB terhadap IPM pada studi ini dapat disebabkan oleh

distribusi pendapatan yang tidak merata, di mana pertumbuhan ekonomi belum diikuti dengan pemerataan hasil pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Ismawati, & Nurcahyani 2021) yang menemukan bahwa di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Banten, PDRB tidak selalu berkorelasi signifikan dengan IPM. Temuan tersebut mengindikasikan, pertumbuhan ekonomi perlu diiringi dengan distribusi yang lebih merata supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.

### **3.4 Pengaruh Belanja Pemerintah di Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2012-2024**

Penelitian ini juga mengindikasikan, belanja pemerintah di sektor pendidikan memengaruhi positif dan signifikan pada IPM di Indonesia selama tahun 2012-2024. Sebagaimana dibuktikan oleh nilai t-statistik senilai 3.049746 dan probabilitas senilai 0,0138 yang signifikan. Hal ini relevan dengan teori Wagner dalam (Mangkoesobroto 2001) yang menghasilkan temuan, belanja pemerintah khususnya di sektor pendidikan termasuk investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia. Belanja pendidikan diharapkan bisa mendorong kualitas sumber daya manusia yang nantinya bisa menambah komponen IPM seperti lama sekolah yang diharapkan dan lama sekolah rata-rata. Temuan studi yang dihasilkan juga mendukung temuan (Angkat and Saharuddin 2024) yang menyatakan bahwa sektor pendidikan memainkan peran krusial pada upaya perbaikan kualitas hidup manusia dan pembangunan di suatu daerah. Namun temuan ini bertolak belakang dengan temuan (Sofilda dkk 2023) yang menyatakan bahwa di Indonesia, belanja di sektor pendidikan tidak signifikan dalam meningkatkan pendapatan per kapita. Oleh karena itu, pengaruh belanja pendidikan terhadap IPM akan berubah tergantung pada skenario daerah dan penerapan kebijakan yang tepat. Makin besar belanja pemerintah di sektor pendidikan, makin besar pula kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal ini akan meningkatkan mutu pendidikan, yang secara langsung terkait dengan peningkatan komponen IPM, yaitu rata-rata lama sekolah dan lama sekolah yang diharapkan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup. Oleh karena itu, kebijakan alokasi anggaran pendidikan yang efisien dan tepat sasaran menjadi penting dalam upaya peningkatan mutu hidup dan IPM di masyarakat Indonesia.

### **3.5 Pengaruh Persentase Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2012-2024**

Berbeda dengan PDRB dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, persentase penduduk miskin dan IPM memperlihatkan pengaruh negatif yang signifikan pada studi ini. Sebagaimana dibuktikan oleh nilai t-statistik senilai -0.010581 dan probabilitas senilai 0,0007. Temuan studi yang dihasilkan mengindikasikan, peningkatan persentase penduduk miskin di Indonesia memengaruhi negatif terhadap IPM. Temuan tersebut relevan dengan teori dan studi terdahulu, bahwa salah satu faktor penghambat utama dalam peningkatan kualitas hidup manusia adalah faktor kemiskinan yang pada gilirannya tercermin dari menurunnya nilai IPM. Teori siklus kemiskinan yang dikemukakan oleh (Todaro & Smith 2006) menjelaskan bahwa kemiskinan ini menciptakan siklus keterbelakangan yang sangat sulit diputus. Kemiskinan menghambat terwujudnya layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang berdampak langsung pada kualitas hidup individu. Hal ini tercermin dari temuan penelitian ini, di mana daerah yang bercirikan kemiskinan tinggi ditemukan memiliki nilai IPM yang lebih rendah. Misalnya, kemiskinan menghambat akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang merupakan dua komponen utama dalam perhitungan IPM. Makin tinggi kemiskinan, makin rendah kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari rendahnya skor IPM.

Temuan yang dihasilkan juga didukung studi terdahulu dari (Nasution dkk 2021) di Kota Medan yang mengindikasikan, tingkat kemiskinan memberikan kontribusi negatif terhadap IPM. Masyarakat miskin biasanya tidak dapat mengakses secara memadai pada pendidikan dan layanan kesehatan yang bermutu, hal ini dapat menjadi penyebab rendahnya angka harapan hidup dan rendahnya tingkat pendidikan, karena kedua dimensi tersebut merupakan indikator IPM. Hal ini menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas dalam strategi pembangunan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Hal ini juga dibuktikan oleh (Si Nyoman & Ni Putu 2021) berikutnya bahwa tingkat kemiskinan memengaruhi negatif terhadap IPM. Mereka menjelaskan bahwa kemiskinan tersebut tidak hanya berdampak negatif terhadap akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tetapi juga rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang berikutnya bisa memengaruhi rendahnya angka harapan hidup atau tingkat pendidikan. Temuan ini memperkuat pandangan di atas bahwa kemiskinan memang merupakan musuh besar dalam upaya mencapai IPM yang lebih baik.

Namun, terdapat pula berbagai penelitian yang menunjukkan pandangan yang beragam, salah satunya yaitu penelitian yang didapat oleh <sup>1</sup> yang menemukan bahwa di beberapa daerah, seperti Provinsi Banten, pengaruh kemiskinan terhadap IPM tidak selalu signifikan. Hasil ini menandakan bahwa meskipun kemiskinan berdampak negatif terhadap IPM, faktor-faktor lain seperti belanja pemerintah, PDRB, dan distribusi sumber daya memengaruhi pencapaian IPM, sehingga dampak kemiskinan bervariasi di setiap daerah.

#### 4. Kesimpulan

Temuan studi yang dihasilkan mengungkapkan bahwa secara bersamaan, Produk Domestik Bruto (PDB), belanja pemerintah di bidang pendidikan, serta tingkat kemiskinan penduduk memberikan dampak yang penting pada IPM di Indonesia. Jika dilihat satu per satu, belanja pemerintah di bidang pendidikan memengaruhi positif yang kuat terhadap IPM, sementara tingkat kemiskinan penduduk menimbulkan efek negatif yang signifikan. Sementara itu, PDB tidak memengaruhi signifikan, yang menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kualitas manusia di Indonesia sangat bergantung pada efektivitas kebijakan pemerintah dalam pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Rekomendasi kebijakan yaitu pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dan pemerataan alokasi anggaran pendidikan agar manfaatnya dirasakan hingga daerah tertinggal. Program pengentasan kemiskinan harus diperkuat melalui penciptaan lapangan kerja produktif, peningkatan keterampilan, serta akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Di samping hal tersebut, pertumbuhan ekonomi mesti diatur agar teratah serta inklusif yang nantinya bisa berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan manusia di Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan merata.

#### Referensi

1. Abdul Kadir, Mahulauw, Dwi Budi Santosa, and Putu Mahardika. 2017. "Pengaruh Pengeluaran Kesehatan Dan Pendidikan Serta Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Maluku." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14(2):122. doi: 10.22219/jep.v14i2.3850.
2. Angkat, Susi Susanti, and Saharuddin Saharuddin. 2024. "Pengaruh Indeks Gini Rasio, Indeks Kemahalan Konstruksi, Pengeluaran Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)." *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 6(2):13. doi: 10.29103/jeru.v6i2.14582.
3. Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2012–2024. <https://www.bps.go.id>
4. Basuki, A. T. 2016. *Analisis Regresi Pada studi Ekonomi Dan Bi*. Rajagrafindo Persada.
5. Basuki, Agus Tri, and Imamudin Yuliadi. 2014. *ELECTRONIC DATA PROCESSING (SPSS 15 Dan EVIEWS 7)*. Vol. 44. Edisi Revi. Yogyakarta: Danisa Media.
6. Dewi, Novita, Yusbar Yusuf, and Rita Yani Iyan. 2017. "Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau." *JOM Fekon* 4(1):870–82.
7. Firdaus, M. 2018. *Aplikasi Ekonometrika Untuk Data Panel Dan Time Series*. IPB Press.
8. Ghozali. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. UNDIP.
9. Ismawati, & Nurcahyani, A. 2021. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Banten." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6(1):1–7.
10. Kiray, Pongsirante, Walewangko, and Irawaty Masloman. 2023. "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Toraja Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23(7):73–84.
11. Lubis, Cici Sari Lubis, Cindi Mutiara Sari, Tengku Indah Syahfitri, and Joko Suharianto. 2024. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Sumatera Utara Tahun 2019–2022." *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3(1):738–55.
12. Mangkoesoebroto, G. 2001. *Ekonomi Publik*. FE UGM.
13. Nasution Diwayana Putri, Muhammad Toyib Daulay, and Epi Handani. 2021. "PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN." *Urnal Ilmiah Abdi Ilmu* 1(14):33–49.
14. Parahita, R. 2018. *Ekonomi Regional: Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
15. Rahman, A., & Putri, D. (2023). Government Expenditure and Human Development in Indonesia: A Provincial Panel Analysis. *Journal of Economic Development Studies*, 15(2), 45–59.
16. Sagar, Ambuj D., and Adil Najam. 1998. "The Human Development Index: A Critical Review." *Ecological Economics* 25(3):249–64. doi: 10.1016/S0921-8009(97)00168-7.
17. Sari. 2018. "EKONOMIS: Jurnal of Economics and Business Vol.2 No.1 Maret 2018." *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Rgec Periode 2012 - 2016* 2(1):13–28.
18. Si Nyoman, S., & Ni Putu, S. 2021. "Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengangguran Dan Pdrb Terhadap Indeks Pembangunan Manusia." *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*.
19. Sofilda, E., Hamzah, M. Z., & Nurhaida, D. 2023. "DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA (Studi Pada Kabupaten/Kota Kurun Waktu 2015–2021)." *Media Ekonomi* 31(1):15–28.
20. Sofilda, Eleonora, Muhammad Zilal Hamzah, and Dida Nurhaida. 2023. "PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA ( Studi Pada Kabupaten / Kota Kurun Waktu 2015–2021 )." 31(1):15–28.
21. Subri, M. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. PT. Raja Grafindo Persada.

22. Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2006. *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan*. Erlangga.
23. United Nations Development Programme (UNDP). (2023). Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock. <https://hdr.undp.org>
24. Yuyun Nuriyah Muslih, Mungin Eddy Wibowo & Edy Purwanto. 2017. "Konseling Behavioral Menggunakan Teknik Kontrak Perilaku Dengan Students' Logbook Untuk Meningkatkan Minat Membaca Siswa." *Jurnal Bimbingan Konseling* 6(1):34-43.